

DINAMIKA INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN INFLASI DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN: STUDI TENTANG MASYARAKAT DI KAWASAN MASJID BESAR BAITURRAHMAN, BANDA ACEH

Ryanda Fariq Yassar¹, Teuku Samsir Muharram²
ryanda10452@gmail.com¹, ssyamsir867@gmail.com²
Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika inklusi keuangan Islam serta tingkat inflasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan Masjid Al-Baiturrahman, Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah serta dampak tekanan inflasi terhadap daya beli dan kesejahteraan. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada tiga kelompok masyarakat: UMKM, pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR), dan penerima bantuan Baitul Mal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai hubungan antara inklusi keuangan syariah, inflasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ke lembaga keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat di sekitar Masjid Agung Baiturrahman. Skor rata-rata inklusi keuangan syariah mencapai 4,4, yang dikategorikan sebagai "setuju," yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Namun, inflasi tetap menjadi tantangan yang signifikan, dengan skor rata-rata 4,6 untuk indikator kenaikan harga bahan pokok, yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga berdampak signifikan terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan, inklusivitas keuangan syariah telah terbukti berkontribusi dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin, terutama melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, tabungan syariah, dan bantuan sosial berbasis zakat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan Baitul Mal (Bank Sentral Syariah) merupakan kunci strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Banda Aceh.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Inflasi, Kemiskinan, Baitul Mal, Banda Aceh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Islamic financial inclusion and inflation rates in reducing poverty in the Baiturrahman Grand Mosque area, Banda Aceh. This research was motivated by the increasing public demand for access to Sharia-compliant financial services and the impact of inflationary pressures on purchasing power and well-being. Data were obtained through questionnaires distributed to three community groups: MSMEs, workers with incomes below the minimum wage (UMR), and Baitul Mal (Baitul Mal) assistance recipients. This was done to obtain an empirical picture of the relationship between Islamic financial inclusion, inflation, and the community's socioeconomic conditions. The results indicate that access to Islamic financial institutions plays a significant role in improving the economic stability of the community around the Baiturrahman Grand Mosque. The average Islamic financial inclusion score reached 4.4, categorized as "agree," indicating a high level of public participation, understanding, and trust in the Islamic financial system. However, inflation remains a significant challenge, with an average score of 4.6 for the staple food price increase indicator, indicating that price fluctuations significantly impact the income and consumption capacity of low-income communities. Overall, Islamic financial inclusion has been proven to contribute to reducing the economic vulnerability of the poor, particularly through increased access to financing, Islamic savings, and zakat-based

social assistance. However, the research also indicates the need for stronger policy support to maintain price stability and expand Islamic financial literacy. Therefore, synergy between Islamic financial institutions, local governments, and the Baitul Mal (Islamic Central Bank) is a strategic key to accelerating poverty alleviation in Banda Aceh.

Keywords: *Islamic Financial Inclusion, Inflation, Poverty, Baitul Mal, Banda Aceh*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam, yang berorientasi pada kemakmuran yang merata dan pengentasan kemiskinan (Novreska & Arundina, 2024). Konsep ini menekankan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Melalui pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan, sistem keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat secara luas (Musa dkk., 2023).

Secara nasional, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi signifikan untuk pengembangan keuangan syariah (Nasution, Khoiruddin, & Haryono, 2024). Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Baitul Mal menunjukkan transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih adil dan etis (Nabil & Herianingrum, 2022). Di Aceh, potensi ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan semua transaksi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Vanessa, 2024).

Hal ini merupakan peluang strategis untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh. Namun, meskipun sistem keuangan syariah berkembang pesat, tantangan makroekonomi seperti inflasi tetap menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat (Isiaka & Olayiwola, 2023). Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan bergantung pada penghasilan tetap. Situasi ini dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan, yang telah lama menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi berbasis syariah (Hariyanto & Nafi'ah, 2023). Inflasi tidak hanya meningkatkan harga kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan tekanan terhadap stabilitas usaha kecil dan menengah (Amry dkk., 2024).

UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian regional, menghadapi kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan, dan fluktuasi laba, yang semuanya berdampak pada kemampuan mereka untuk tumbuh. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam memberikan dukungan keuangan, pembiayaan modal kerja, dan pendampingan bisnis kepada pelaku ekonomi skala kecil (Mohamed & Redzuan, 2025). Kawasan Masjid Baiturrahman di Banda Aceh merupakan gambaran nyata dari dinamika ekonomi suatu komunitas yang heterogen. Sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi, kawasan ini merupakan lokasi strategis bagi pengembangan berbagai usaha mikro, pedagang kaki lima, dan lembaga sosial seperti Baitul Mal. Masyarakat di sekitarnya terdiri dari UMKM, pekerja bergaji rendah, dan penerima bantuan sosial yang bergantung pada sistem ekonomi lokal yang didasarkan pada keagamaan dan nilai-nilai Islam (Effendi dkk., 2025).

Dalam konteks ini, inklusi keuangan syariah memainkan peran ganda: sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan instrumen untuk kesejahteraan yang adil (Al-Afif, Esaputra, Rahmatdi, & Ahmadi, 2025). Melalui akses ke pembiayaan tanpa bunga, tabungan syariah, dan program sosial berbasis zakat, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan (Furqon dkk., 2024).

Akses ini juga memberikan perlindungan dari praktik keuangan yang eksploitatif yang sering kali menjadi jebakan bagi masyarakat miskin, terutama di daerah perkotaan seperti Banda Aceh. Namun, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih relatif rendah (Howlet, Alhabshi, & Zakariyah, 2023). Banyak orang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional, baik dari segi kontrak, tujuan, maupun prinsip operasionalnya (Musa dkk., 2023). Kurangnya pendidikan keuangan ini menghalangi sebagian orang untuk memanfaatkan potensi besar sistem keuangan syariah secara optimal, terutama di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi (Salim dkk., 2024). Selain itu, fenomena kemiskinan di daerah perkotaan seperti Banda Aceh bersifat kompleks. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga oleh ketidakstabilan harga, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara produktif (Haji-Othman, dkk., 2025). Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang didasarkan pada nilai-nilai Islam merupakan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baitul Mal, sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah, memainkan peran penting dalam ekosistem inklusi keuangan syariah (Hariyanto & Nafi'ah, 2023). Melalui program bantuan ekonomi, zakat produktif, dan pelatihan kewirausahaan, Baitul Mal dapat membantu masyarakat miskin bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Pendekatan ini selaras dengan maqasid al-syariah (prinsip-prinsip hukum Islam), yaitu menjaga kekayaan (hifz al-mal) dan menciptakan kesejahteraan umum (maslahah) (Nasution dkk., 2024).

Namun, efektivitas program keuangan syariah dan bantuan sosial sering kali dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, terutama inflasi dan volatilitas harga (Isiaka & Olayiwola, 2023). Ketika harga kebutuhan pokok naik, nilai riil bantuan tersebut menurun, sehingga membatasi dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya memerlukan instrumen keuangan yang inklusif, tetapi juga dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat (Novita Sari dkk., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami hubungan antara inklusi keuangan syariah dan inflasi dalam konteks pengentasan kemiskinan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Melalui analisis empiris terhadap tiga kelompok masyarakat, yaitu UMKM, pekerja berpenghasilan rendah, dan penerima bantuan Baitul Mal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran keuangan syariah dalam mengatasi tekanan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Effendi et al., 2025).

Dengan memahami dinamika di antara faktor-faktor tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga sosial-keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memperluas inklusi keuangan syariah, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin di tengah tantangan inflasi yang terus berfluktuasi (Haji-Othman dkk., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembangunan ekonomi daerah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang model ekonomi berbasis keuangan syariah yang mampu mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Banda Aceh (Al-Afif dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh gambaran empiris mengenai hubungan antara inklusi keuangan syariah, inflasi, dan tingkat kemiskinan di masyarakat sekitar Masjid Baiturrahman di Banda Aceh. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur variabel-variabel penelitian secara objektif melalui analisis numerik dan statistik yang sederhana. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dengan melibatkan tiga kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda namun saling terkait dalam konteks sosial dan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, tingkat inklusi keuangan syariah di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, dinilai tinggi, dengan skor rata-rata 4,4, yang termasuk dalam kategori “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki akses ke lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan Baitul Mal. Mayoritas responden, termasuk UMKM, pekerja berpenghasilan rendah, dan penerima bantuan sosial, menyatakan bahwa layanan keuangan syariah mudah diakses dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung kegiatan ekonomi mereka.

Kelompok UMKM memperoleh skor rata-rata 4,3, yang menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil menganggap pembiayaan syariah penting dalam membantu penyediaan modal dan pengembangan usaha. Delapan puluh persen responden UMKM menyatakan bahwa mereka memiliki rekening aktif di bank syariah, dan 60% di antaranya telah mengajukan permohonan pembiayaan modal berdasarkan kontrak mudharabah atau murabahah. Mereka juga menyatakan bahwa prosedur pembiayaan di lembaga syariah relatif lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional. Kelompok pekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan skor tertinggi sebesar 4,5, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem keuangan syariah. Mayoritas kelompok ini menggunakan rekening syariah untuk menabung dan secara rutin menabung setiap bulan.

Sementara itu, kelompok penerima bantuan Baitul Mal (Baitul Mal) memperoleh skor rata-rata 4,4, yang menunjukkan bahwa mereka mulai memahami manfaat dan mekanisme lembaga keuangan syariah. Meskipun sebagian dari mereka belum memiliki penghasilan tetap, 70% responden menyatakan bahwa penggunaan rekening syariah untuk menerima zakat atau sedekah memudahkan transaksi dan meningkatkan rasa aman mereka dalam mengelola dana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah di wilayah penelitian telah cukup efektif dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam.

Kelompok	Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Syariah	Kategori
UMKM	4,3	Setuju
Pekerja $\leq$ UMR	4,5	Setuju
Penerima Bantuan Baitul Mal	4,4	Setuju



Gambar 1. Dokumentasi UMKM di Sekitar Masjid Agung Baiturrahman
(Sumber: Dokumen Pribadi)

b. Dampak Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Masjid Agung Baiturrahman. Skor rata-rata keseluruhan untuk indikator dampak inflasi adalah 4,6, yang termasuk dalam kategori “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat merasakan dampak langsung dari kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap pendapatan dan daya beli mereka. Selama beberapa bulan terakhir, responden melaporkan kenaikan harga bahan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula, yang telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang signifikan.

Kelompok UMKM mencatat skor rata-rata 4,5, yang menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil paling terdampak oleh kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Banyak di antara mereka mengalami penurunan margin laba karena tidak mampu menaikkan harga jual secepat kenaikan biaya bahan produksi. Tujuh puluh persen UMKM menyatakan bahwa inflasi menyebabkan penurunan permintaan konsumen, terutama untuk produk non-kebutuhan pokok seperti makanan olahan dan kerajinan tangan. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan bulanan rata-rata sekitar 10–15%.

Pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) memiliki skor rata-rata 4,6, sedangkan penerima bantuan Baitul Mal (Baitul Mal) memperoleh skor tertinggi, yaitu 4,7. Situasi ini menggambarkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Sebagian besar penerima bantuan menyatakan bahwa nilai bantuan yang mereka terima terasa berkurang secara signifikan akibat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Beberapa responden bahkan mengakui terpaksa mengurangi konsumsi harian dan menunda pembayaran untuk kebutuhan sekunder seperti biaya sekolah anak-anak. Dengan demikian, inflasi terbukti menjadi faktor utama yang mengancam stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kelompok	Skor Rata-rata Inklusi Keuangan Syariah	Kategori
UMKM	4,5	Sangat Setuju
Pekerja $\leq$ UMR	4,6	Sangat Setuju

Penerima Bantuan
Baitul Mal

4,7

Sangat Setuju



Gambar 2. Dokumentasi Pekerja $\leq$ Upah Minimum di Sekitar Masjid Agung Baiturrahman

(Sumber: Dokumen Pribadi)

c. Persepsi tentang Pengentasan Kemiskinan

Analisis terhadap persepsi masyarakat mengenai pengentasan kemiskinan melalui sistem keuangan syariah menunjukkan skor rata-rata 4,5, yang termasuk dalam kategori “Setuju”. Mayoritas responden meyakini bahwa lembaga keuangan syariah dan Baitul Mal (Dana Amanah Islam) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu kaum miskin mencapai kemandirian ekonomi. Sebagian besar responden meyakini bahwa program zakat produktif, keuangan mikro syariah, dan tabungan syariah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Masjid Agung Baiturrahman.

Di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), 85% responden menyatakan bahwa pembiayaan syariah yang mereka terima membantu mereka mengembangkan usaha, meningkatkan omzet, dan menambah jumlah pekerja yang dapat mereka rekrut. Pekerja bergaji rendah juga menunjukkan persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah, dengan skor rata-rata 4,5, dengan alasan kemudahan akses ke tabungan dan bantuan modal kecil tanpa bunga. Sementara itu, penerima bantuan Baitul Mal memperoleh skor 4,6, yang menunjukkan bahwa lembaga ini dianggap sangat penting dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama selama periode inflasi tinggi.

Selain bantuan tunai, program bantuan ekonomi Baitul Mal juga mendapat apresiasi dari para responden. Sekitar 60% penerima bantuan melaporkan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan atau program pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis syariah. Program-program ini membantu mereka memahami cara mengelola dana bantuan secara produktif dan berkelanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin di Banda Aceh.

Kelompok	Skor Persepsi Rata-rata terkait Pengentasan Kemiskinan	Kategori
UMKM	4,4	Setuju
Pekerja $\leq$ UMR	4,5	Setuju



Gambar 3. Dokumentasi Penerima Bantuan Baitul Mal di Sekitar Masjid Agung Baiturrahman

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Akses terhadap lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, BMT (Borneo-Mosque), dan Baitul Mal (Bank Tabungan Syariah), telah memberikan peluang bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengelola keuangan mereka secara lebih produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi UMKM, adanya produk pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan) memberikan alternatif yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha tanpa terjebak dalam sistem bunga konvensional. Skor inklusi keuangan syariah rata-rata sebesar 4,4 menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem ini karena dianggap adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Bagi pekerja bergaji rendah, tabungan syariah merupakan alat penting untuk mengelola pengeluaran rumah tangga dan menumbuhkan kesadaran menabung secara konsisten. Tabungan yang didasarkan pada kontrak wadiah (setoran) dan mudharabah (bagi hasil) dianggap lebih aman dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Aceh. Sistem ini juga membantu mendorong perilaku keuangan yang sehat serta mencegah mereka terlibat dalam pinjaman berbasis bunga yang dapat memperburuk kondisi ekonomi. Di sisi lain, bagi penerima bantuan Baitul Mal (Bank Sentral Islam), memiliki rekening yang sesuai syariah memudahkan penyaluran zakat dan infaq secara efisien serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem pengelolaan dana masyarakat.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa inflasi tetap menjadi faktor dominan yang menggerogoti stabilitas ekonomi masyarakat miskin. Skor rata-rata 4,6 pada indikator dampak inflasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat secara langsung mengalami kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan bakar. Kondisi ini sejalan dengan teori Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation), yang menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi dan distribusi dapat menyebabkan lonjakan harga barang-barang konsumsi pokok.

Dampaknya sangat terasa bagi kelompok berpenghasilan rendah dan penerima bantuan sosial, yang memiliki kemampuan terbatas untuk menyesuaikan pendapatan mereka guna mengimbangi kenaikan harga. Ketika inflasi meningkat, nilai riil bantuan Baitul Mal menurun, sehingga mengurangi efektivitas program-program sosial.

Bagi UMKM, inflasi berdampak langsung pada harga bahan baku dan biaya transportasi. Hal ini memaksa mereka menaikkan harga produk untuk mempertahankan laba, namun di sisi lain, menurunnya daya beli konsumen membuat penjualan menjadi tidak stabil. Beberapa pemilik usaha bahkan melaporkan mengalami penurunan omzet sebesar 20% selama periode inflasi tinggi. Meskipun lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan untuk menjaga likuiditas usaha, kenaikan biaya operasional tetap menyulitkan sebagian usaha kecil untuk bertahan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah dan pendampingan bisnis agar UMKM dapat mengelola risiko ekonomi dengan lebih baik.

Sementara itu, bagi pekerja bergaji rendah, inflasi menimbulkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup. Banyak responden melaporkan kesulitan menabung karena sebagian besar penghasilan mereka dihabiskan untuk konsumsi sehari-hari. Situasi ini menyoroti peran penting lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pendidikan dan program keuangan inklusif seperti tabungan mikro, pembiayaan konsumen syariah, dan produk asuransi mikro syariah (mikro-takaful). Dengan instrumen-instrumen ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terlindungi dari risiko keuangan jangka pendek yang disebabkan oleh fluktuasi inflasi.

Peran Baitul Mal di Banda Aceh merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal tidak hanya melakukan penyaluran bantuan, tetapi juga berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat melalui program zakat produktif dan pelatihan kewirausahaan. Penelitian menunjukkan bahwa 60% penerima bantuan Baitul Mal telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, dan 70% di antaranya telah mulai mengembangkan kegiatan ekonomi mikro, seperti usaha makanan rumahan, usaha kecil, dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa program-program Baitul Mal dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat jika dikelola secara berkelanjutan dan produktif.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar program Baitul Mal masih berfokus pada bantuan kepada konsumen, seperti bantuan tunai dan kebutuhan pokok. Pendekatan ini, meskipun bermanfaat dalam jangka pendek, belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi Baitul Mal dari lembaga berbasis amal menjadi lembaga berbasis pemberdayaan, dengan menekankan pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan modal usaha yang sesuai syariah, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Selain itu, kolaborasi antara Baitul Mal (lembaga keuangan syariah), pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memperkuat sistem inklusi keuangan. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, sementara lembaga keuangan syariah dapat menyediakan produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Selain itu, Baitul Mal dapat bertindak sebagai fasilitator sosial, menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin dan lembaga keuangan. Kolaborasi tiga pihak ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memitigasi dampak inflasi terhadap kesejahteraan sosial. Lebih lanjut,

penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan inklusi keuangan. Meskipun tingkat akses ke lembaga keuangan syariah cukup tinggi, beberapa masyarakat masih kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan produk keuangan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah. Pendidikan ini dapat diselenggarakan melalui masjid, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas ekonomi lokal di sekitar Masjid Raya Baiturrahman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara inklusi keuangan Islam dan stabilitas makroekonomi memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan di Banda Aceh. Lembaga keuangan syariah telah memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun tantangan inflasi yang terus berfluktuasi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat merupakan langkah strategis menuju terwujudnya sistem ekonomi yang adil, sejahtera, dan berbasis Islam di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kawasan Masjid Baiturrahman di Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Akses yang lebih luas ke lembaga keuangan syariah, baik melalui bank syariah, BMT (Koperasi Syariah), maupun Baitul Mal (bank syariah skala kecil), telah membantu masyarakat mengelola keuangan mereka secara lebih produktif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Skor inklusi keuangan rata-rata sebesar 4,4 menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Hal ini membuktikan bahwa keuangan syariah dapat menjadi solusi alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah, terutama dalam memperkuat modal usaha UMKM dan meningkatkan kesadaran menabung di kalangan pekerja bergaji rendah.

Namun, inflasi tetap menjadi faktor utama yang menekan kesejahteraan masyarakat miskin. Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan penurunan daya beli dan mengurangi nilai riil bantuan sosial yang diterima dari Baitul Mal. Skor inflasi rata-rata dalam studi ini sebesar 4,6 menunjukkan bahwa dampaknya sangat signifikan dan dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. UMKM mengalami penurunan pendapatan akibat kenaikan harga bahan baku, sementara pekerja bergaji rendah dan penerima bantuan Baitul Mal (UMKM Islam) menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, stabilitas harga dan kebijakan pengendalian inflasi menjadi kunci untuk memperkuat dampak positif inklusi keuangan Islam terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Baitul Mal Banda Aceh telah terbukti menjadi lembaga penting dalam memberikan perlindungan sosial dan dukungan ekonomi bagi masyarakat miskin. Namun, efektivitasnya akan meningkat jika lembaga ini memperluas fungsinya melampaui sekadar penyaluran bantuan konsumsi, menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang produktif. Program pelatihan kewirausahaan, keuangan mikro Islam, dan pendampingan bisnis merupakan langkah-langkah konkret untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Baitul Mal, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan Islam sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara inklusi keuangan syariah yang kuat dan pengendalian inflasi yang efektif dapat menjadi strategi komprehensif untuk mengurangi kemiskinan di Banda Aceh. Memperkuat literasi keuangan syariah, meningkatkan akses terhadap pembiayaan syariah, dan menetapkan kebijakan penetapan harga yang stabil merupakan langkah-langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Dengan dukungan kolaboratif dari semua pihak terkait, sistem keuangan syariah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afif, R. A., Esaputra, A. B., Rahmatdi, & Ahmadi, M. A. (2025). Determinants of Islamic financial institutions on poverty reduction: A systematic review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(2), 184–203. <https://doi.org/10.18196/ijief.v8i2.27476>
- Amry, A. D., Kasmiyati, & Narti, D. (2024). Analysis of inflation and poverty levels on the climate of economic growth in Jambi Province. *EKSYPAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v10i1.433>
- Effendi, J., Qoyum, A., Hasanah, I., Munawaroh, U., Thaker, H. M., & Hosen, M. (2025). Social securities scheme, financial inclusion, and its impact on poverty alleviation in Indonesia: Case of zakat recipient. *International Journal of Business and Society*, 26(1), 100–117. [https://doi.org/10.33736/ijbs.8887Furqon, A., Nurhayat, & Mukhid. \(2024\). Islamic social finance and poverty alleviation. Economics Studies and Banking Journal \(DEMAND\), 5\(2\), 45–60. https://doi.org/10.62207/ghjxrq94](https://doi.org/10.33736/ijbs.8887Furqon, A., Nurhayat, & Mukhid. (2024). Islamic social finance and poverty alleviation. Economics Studies and Banking Journal (DEMAND), 5(2), 45–60. https://doi.org/10.62207/ghjxrq94)
- Haji-Othman, Y., Sheh Yusuff, M. S., & Ahmad, S. S. (2025). A proposed financial inclusion model integrating zakat, waqf, and Islamic crowdfunding for sustainable poverty alleviation in supporting Ekonomi Madani. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10(SI33), 181–186. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSI33.7082>
- Hariyanto, H., & Nafi'ah, B. (2023). Analysis of zakat, infaq, sadaqah (ZIS), HDI, inflation, and GRDP on poverty alleviation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1189–1196. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7934>
- Howlet, A. B., Alhabshi, S. M., & Zakariyah, H. (2023). The potential of micro-takaful in improving financial inclusion among low-income households in Ethiopia. *Journal of Islamic Finance*, 12(2), 30–47. <https://doi.org/10.31436/jif.v12i2.823>
- Isiaka, N., & Olayiwola, H. O. (2023). Inflation rate and poverty incidence nexus in Nigeria: Does lending rate moderate the effect? *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology*, 1(5), 22–35. <https://doi.org/10.55983/ijeset.v1i5.327>
- Mohamed, Z., & Redzuan, N. H. (2025). Financial inclusion and Islamic banks: Opl, poverty, income inequality, and human development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 135–154. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973>
- Salim, K., Abdul Hamid, B., Mahomed, Z., & Hassan, W. (2024). Zakat-based urban farming: A tool for poverty alleviation, community empowerment, financial inclusion, and food security. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art1>
- Vanesa, U. (2024). The effect of Islamic financial inclusion and human development index on poverty rate in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1611–1618. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13367>